

PENGEMBANGAN PARIWISATA INKLUSIF DI PANTAI CEMARA KABUPATEN BIREUEN

***Hayatul Laini¹, Maryam², Murniati³**

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

*Email: arihulriski@gmail.com

Abstract

This study examines the development of inclusive tourism at Cemara Beach in Bireuen Regency, with the objective of describing its progress and analyzing the obstacles encountered in its implementation. The research highlights that the development of Cemara Beach has yet to produce significant economic improvement for the local community, as economic benefits remain concentrated among stallholders and parking attendants. Additionally, environmental pollution persists due to the lack of adequate waste disposal facilities, leading visitors to discard garbage among the rocks. The study employs Miller & Katz's Inclusivity Theory, which addresses economic, environmental, and social dimensions. Data were collected through non-participant observation, where researchers observed activities without direct involvement. The findings reveal that the economic benefits of tourism development at Cemara Beach have not been widely distributed among the local population, aside from traders and parking attendants. Furthermore, from both environmental and social perspectives, Cemara Beach has not yet achieved the standards of inclusive tourism, as pollution from waste accumulation, such as diapers and plastic bottles, remains prevalent. Obstacles to the development of inclusive tourism include inadequate facilities and infrastructure—such as the absence of signage and narrow roads during market days—as well as parking fees that no longer contribute to increasing local village revenue.

Keywords: *Inclusive Tourism, Cemara Beach, Economic Impact, Environmental Management, Bireuen Regency*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara, Kabupaten Bireuen, dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangannya serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Pantai Cemara belum memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, karena manfaat ekonomi masih terfokus pada pedagang yang memperoleh lapak berjualan dan juru parkir. Selain itu, pencemaran lingkungan masih terjadi akibat minimnya fasilitas pembuangan sampah, sehingga sebagian pengunjung membuang sampah di celah-celah batu. Penelitian ini menggunakan Teori Inklusivitas Miller & Katz yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata di Pantai Cemara belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal kecuali pedagang dan juru parkir. Dari aspek lingkungan dan sosial, Pantai Cemara juga belum memenuhi kriteria

pariwisata inklusif karena masih ditemukan penumpukan sampah seperti popok bekas dan botol plastik di area wisata dan tambak warga. Hambatan utama dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara meliputi fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti kurangnya papan petunjuk serta jalan yang sempit pada hari-hari tertentu, serta retribusi parkir yang tidak lagi berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Gampong.

Kata Kunci: *Pariwisata Inklusif, Pantai Cemara, Dampak Ekonomi, Pengelolaan Lingkungan, Kabupaten Bireuen*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Dimana, perkembangan pariwisata Indonesia juga menjadi fokus pemerintah dalam menaikkan devisa negara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki salah satu cara dalam meningkatkan daya tarik wisata dalam negeri dengan membuat berbagai upaya. Dalam upaya untuk terus mengembangkan pariwisata, pemerintah mengacu pada kebutuhan wisatawan yang merupakan hak setiap masyarakat dalam menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah termasuk bagi penyandang disabilitas. Pengembangan pariwisata juga mampu meningkatkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, dengan memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ismail, dkk (2023:12) inklusifitas merupakan ajakan atau mengikutsertakan. Hal ini mengimplikasikan bahwa sikap ini sangat diperlukan dalam sebuah lingkungan. Inklusif pada dasarnya adalah memosisikan diri dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain yang ada di sekitarnya. Inklusivitas menjadikan masyarakat memiliki wawasan yang terbuka terkait keberagaman identitas serta menumbukan rasa toleransi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya sifat inklusif masyarakat, dapat menerima dan mudah berinteraksi dengan latar belakang dan identitas lainnya. Tujuan pembangunan inklusif adalah menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pengembangan sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, dimana pembangunan wisata ini menjadi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan wisata dengan memerhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi pada jangka panjang. Pariwisata merupakan sektor yang cukup besar di dunia dan memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Konsep Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan muncul untuk

mengatasi dampak negatif pembangunan pariwisata dengan prinsip membangun pariwisata dan memenuhi kebutuhan seluruh stakeholder pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang saat ini terkenal dengan destinasi ekowisatanya adalah Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Kabupaten Bireuen yang mempunyai letak strategis juga merupakan salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisatawan di Bireuen. Hal itu disebabkan karena tidak sedikit wisatawan pengguna jalur darat yang meluangkan waktu untuk singgah di Kabupaten Bireuen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan, menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Pariwisata, dalam mengembangkan pariwisata harus dilihat berdasarkan meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi, ekonomi kreatif nasional I, meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan indonesia, bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terwujudnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif, meningkatnya kapabilitas sdm kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan, membahas mengenai pelestarian wisata, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen juga tidak terlepas dari Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen. Pengelolaan pariwisata Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh memiliki objek pariwisata yang menarik untuk di kunjungi setiap tahunnya.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, *peneliti* menemukan bahwa sebelum pantai cemara di resmikan, pengujung hanya sedikit yang melakukan kunjungan dan hanya berkunjung dihari libur saja untuk menikmati suasana pantai. Namun, sekarang ini kunjungan wisatawan mulai ramai, sehingga pedagang di lokasi wisata mulai meraup keuntungan dari hasil berjualannya dan hal ini memberikan dampak baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Observasi awal, 10 Oktober 2024). Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Informan sebagai tokoh masyarakat, mengatakan bahwa objek wisata tersebut bertujuan untuk menjadi tempat liburan keluarga dan bermain anak-anak serta peningkatan pengujung di Pantai Cemara

dikarenakan tempat, sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sehingga pengunjung merasa nyaman dan aman berada di objek wisata tersebut (Wawancara awal, 10 Oktober 2024).

Sebelum adanya pengembangan pariwisata, masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi wisata hanya memperoleh pendapatan dari hasil bekerja sebagai buruh atau lainnya. Pendapatan mereka berada di bawah Rp.50.000 setiap harinya. Pengembangan objek wisata Pantai Cemara dilakukan oleh stakeholder terutama dinas pariwisata dan pemerintah gampong. Pengembangan wisata Pantai Cemara memberikan dampak bagus dalam peningkatan pendapatan masyarakat meskipun belum maksimal dikarenakan peningkatan pendapatan tersebut hanya dirasakan oleh pedagang dan tukang parkir, sementara masyarakat lokal lainnya belum merasakan hal tersebut secara merata. Peningkatan pendapatan Gampong di lokasi wisata terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 PAD Gampong Lingkakuta Tahun 2019-2024

Tahun	Perekonomian Desa Wilayah Pantai Cemara
2019	Rp.8.324.233
2020	Rp.765.000
2021	Rp.9.230.00
2022	Rp.6.870.000
2023	Rp.11.632.000
2024	Rp.14.210.000

Sumber: Laporan Gampong Lingkakuta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 ke tahun 2024 perekonomian masyarakat di Gampong Lingkakuta mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan penurunan, pada tahun 2019 perekonomian mencapai Rp.8.324.233 namun pada tahun 2020 perekonomian Gampong Lingkakuta mengalami penurunan sebesar Rp.765.000, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.9.230.000, akan tetapi di tahun 2022 perekonomian Gampong Lingkakuta mengalami penurunan sebesar 6.870.000, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023-2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab sektor pariwisata belum memberikan dampak secara maksimal dalam pendapatan Gampong.

Pantai Cemara yang terletak di Kecamatan Gandapura mulai dikenal sejak tahun 2019 sampai saat ini wisata Pantai Cemara masih sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, bukan dari daerah Kabupaten Bireuen saja melainkan juga dari daerah lainnya. Peningkatan jumlah pengujung di Pantai Cemara membuktikan bahwa Pantai Cemara merupakan pantai yang memiliki inklusivitas dalam hal pembangunan serta pengelolaannya. Pada tahun 2021 objek wisata Pantai Cemara ini mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.500.000.000 dari kementerian desa. Bantuan program objek pengembangan wisata tersebut berupa pembangunan 9 kios

pedagang, masing-masing berukuran 3x3,5 meter dan juga satu balai tradisional berukuran 6x11 meter, kamar mandi, mushalla, jalan internal, dan tempat parkiran dan jaringan air.

Pantai Cemara tersebut sudah diresmikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 5 Agustus 2023. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa pengembangan Pantai Cemara di Kabupaten Bireuen belum meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, karena belum terjadinya pemerataan pendapatan, dampak dari pariwisata hanya dirasakan oleh pedagang yang mendapatkan lapak berjualan dan juga juru parkir. Kemudian terjadinya pencemaran lingkungan karena minimnya tempat sampah yang mengakibatkan sebahagian pengunjung membuang sampah di celah-celah batu. Fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, dan juga retribusi parkir belum mampu meningkatkan pendapatan asli gampong, infrastruktur yang belum memadai seperti tidak adanya penunjuk arah menuju pantai cemara dan jalan masuk padat pada hari-hari tertentu (hari peukan), sehingga menimbulkan kemacetan.

B. METODE

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018:29) metode kualitatif merupakan pendekatan pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan yang berbeda dari pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi dan peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaan peneliti dalam penelitian ini tidak terpisahkan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam praktiknya, data dikumpulkan dengan mengamati, mengeksplorasi, dan mengajukan pertanyaan dan partisipan langsung kepada masyarakat dan kedalaman data didapat melalui diskusi-diskusi dan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap sebagai sumber data utama untuk penelitian ini. Setelah melakukan beberapa observasi dan wawancara dengan berbagai sumber, materi yang dipilih didasarkan pada keakuratan pengalaman, posisi, dan saran dari berbagai pihak. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai inklusivitas pengembangan wisata Pantai Cemara dan mengetahui mengenai hambatan yang terjadi pada saat menjalankan proses tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Pariwisata Inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen

Untuk mengukur bagaimana dampak dari pengembangan objek wisata pantai Cemara, peneliti menggunakan 3 aspek Inklusivitas menurut Miller & Katz (2009: 83) yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial, sedangkan

aspek budaya tidak dimasukkan dalam penelitian dikarenakan apa yang disampaikan oleh Miller & Katz tidak menjadi suatu permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan pengunjung di Pantai Cemara memiliki budaya yang sama, oleh karena itu 3 aspek tersebut sebagai berikut:

1) Aspek Sosial

Dalam aspek sosial wisata Pantai Cemara bisa menjadi pariwisata yang inklusif, hal ini dikarenakan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga banyak dari masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin bagus pendapatan yang dimiliki oleh seorang pedagang dan semakin meningkat jumlah kunjungan, maka dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja baru. Dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja ini memberikan satu hal positif dimana pantai cemara sudah dikatakan pantai yang mengalami pengembangan cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Miller & Katz (2009) menyatakan bahwa pembangunan suatu wilayah dikatakan inklusif apabila wilayah tersebut mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dimana inklusivitas terjadi pada semua lingkungan social baik keluarga, pada kelompok teman sebaya, pada sekolah, pada institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Inklusivitas dalam pengembangan merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi system kelompok dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

Penyerapan tenaga kerja di Pantai Cemara cukup stabil, dimana setiap tahunnya ada saja penambahan tenaga kerja baru dalam setiap pondok. Artinya pemerintah Gampong berhasil membentuk pantai cemara sebagai pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sehingga dengan meningkatkannya jumlah wisatawan, maka meningkat juga pendapatan pedagang dan pedagang dapat menambahkan pondok-pondok tempat bersantai. Dengan penambahan pondok tersebut, pedagang juga harus meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Artinya dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka hal ini sesuai dengan teori Miller & Katz (2009) dimana yang paling utama dilihat dari keberhasilan wisata inklusif adalah meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja.

2) Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi diketahui bahwa dalam pengembangan pantai cemara belum sepenuhnya mencapai pengembangan secara inklusif, dimana dari segi aspek ekonomi pantai cemara sudah memenuhi standar pendapatan yang cukup baik. Akan tetapi, standar pendapatan tersebut haruslah bertahan sampai pantai tersebut termasuk kedalam pantai yang sudah mencapai inklusivitas secara maksimal. Pengembangan pantai cemara harus ilihat dalam aspek yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti aspek ekonomi. Seperti halnya pendapat Yoeti (2017) dimana prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi

penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat setempat, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, destinasi pariwisata dapat mengurangi dampak negatif pariwisata dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata. Artinya pengembangan pariwisata bukan hanya dilihat dari kurangnya jumlah pengangguran melainkan juga dari meningkatnya kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pantai cemara.

3) Aspek Lingkungan

Upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui kepedulian terhadap lingkungan sangat penting. Misalnya, dengan mengambil sampah yang berserakan di sekitar penjual dan membuangnya ke tempat sampah. Hal serupa dilakukan dengan mengambil sampah kayu atau plastik di kawasan pinggir laut dan membuangnya ke tempat sampah. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh pedagang, tetapi juga oleh pengunjung, yang secara tidak langsung memperkuat kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan sekitar sangat penting, dan melibatkan masyarakat dalam partisipasi adalah langkah yang ditekankan.

Dalam aspek lingkungan memperlihatkan bahwa, fasilitas objek wisata yang terkait dengan kebersihan kurang memadai karena fasilitas untuk tempat sampah masih sangat terbatas. Sampah yang berserakan yang ada dimana saja membuat Pantai Cemara ini terlihat belum inklusif, dikarenakan sampah yang ada dimana saja membuat objek wisata terlihat tidak bersih atau kotor.

Djalle (2004) menjelaskan bahwa dampak negatif dari penumpukan sampah yaitu menimbulkan polusi air, udara, suara dan tanah, meningkatkan erosi yang berupa: abrasi pantai, tanah longsor, kerusakan geologi, dan kerusakan tepi sungai dan terjadinya penumpukan sampah dan limbah yang merusak ekosistem di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis dimana banyak sampah yang sudah menumpuk yang tidak dibersihkan. Pedagang hanya membersihkan sampah yang berada di sekitar kios mereka sendiri, sedangkan untuk sampah-sampah yang berada di celah batu, area pantai dan tambak milik orang lain tidak dibersihkan sama sekali.

2. Hambatan Dalam Pengembangan Pariwisata Inklusif Di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen

1) Akses Jalan

Sarana dan prasarana yang kurang yang kurang memadai hal ini merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif,

lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud. Sarana pariwisata sebagai ujung tombak wisata kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pelayanan ke wisatawan disuatu daerah tujuan wisata dimana keberadaanya sangat tergantung kepada wisatawan pada adanya perjalanan wisata tetapi dalam hal ini sarana dan prasarana yang belum memadai membuat objek wisata Pantai Cemara tidak begitu maksimal dalam pengembangannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Pantai Cemara karena jika sarana dan prasarana memadai maka minat wisatawan pula akan meningkat, disamping itu sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung dari sistem pengelolaan.

Akses jalan hanya bisa diberikan satu akses saja, karena banyak pihak yang belum mendukung akan dibukanya akses jalan baru melalui gampong Alue Mangki, dimana pemerintah gampong Alue Mangki belum memberikan izin secara terbuka. Artinya berdasarkan teori Miller & Katz (2009) seharusnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berwisata, tentunya adalah sarana dan prasarana pendukung wisata, pengunjung akan lebih nyaman dan lebih menikmati kegiatan berwisata apabila sarana dan prasarananya lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung, untuk itu sarana dan prasarana dalam sebuah tempat pariwisata untuk pendukung wisata sangatlah penting. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pihak pengelola untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. disamping itu sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung dari inklusivitasnya pantai tersebut.

2) Keamanan/ Parkir

Hambatan selanjutnya dalam pengembangan pantai cemara dengan tujuan inklusivitas adalah kemanan dan adanya parkir. Dimana upaya menjaga keamanan dalam kenyamanan pengunjung di pantai cemara harusnya sudah berjalan cukup baik dan maksimal, ini terlihat dari adanya parkir yang dibuat oleh pemuda setempat supaya keamanan dari kendaraan milik pengunjung aman. Akan tetapi yang menjadi kendalanya adalah retribusi parkir yang tidak diperoleh oleh gamping untuk peningkatan Pendapatan Asli Gampongnya.

Untuk keamanan sudah dilakukan dengan maksimal, dimana pengunjung diberikan tiket masuk dan mengambil biaya parkir sebesar Rp.3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.5.000 untuk kendaraan roda 4. Akan tetapi biaya parkir tersebut hanya dirasakan oleh mereka pihak parkir saja. Sedangkan untuk Pendapatan Gampong tidak dibeikan sama sekali di tahun 2024. Artinya terdapat permasalahan dalam pengutipan biaya parkir untuk gampng dimana hal ini tidak sesuai dengan teori Miller & Katz (2009) yang menyatakan bahwa konsep yang merujuk pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan merata. Inklusivitas bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi, etnisitas, agama, jenis kelamin, atau

kemampuan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Biaya parkir yang seharusnya diberikan untuk Gampong hanya diberikan sebanyak 4 kali ditahun 2019, 2021, 2022. Pada tahun 2020 biaya parkir untuk Gampong tidak diberikan karena pada saat sedang ada pembatasan kegiatan ekonomi karena Covid-19. Namun pemberian biaya parkir tahun 2023 mulai menurun dan pada tahun 2024 pihak parkir sama sekali tidak memberikan biaya untuk Gampong dikarenakan biaya tersebut dibagi sama rata dengan pihak parkir lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas, menggambarkan bahwa hambatan yang terjadi dalam parkir adalah pengutipan biaya untuk desa yang tidak diberikan, sehingga jika dilihat berdasarkan teori Miller & Katz (2009) dimana mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga pendapatan wilayah. Artinya dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara belum sepenuhnya dikatakan inklusif, hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengembangannya.

D. KESIMPULAN

Pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen pada aspek ekonomi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Gampong Lingkakuta, meskipun yang banyak merasakan manfaatnya hanya masyarakat yang berjualan dan juru parkir di Pantai Cemara. Dari aspek sosial pantai cemara mampu menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Sementara pada aspek lingkungan masih terjadinya pencemaran lingkungan karena penyediaan tempat sampah yang minim yang mengakibatkan sebahagian pengunjung membuang sampah di celah celah batu. Hambatan dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen terlihat dari sarana dan prasarana, dimana tidak terdapat penujuk arah menuju pantai cemara dan juga jalan yang terlalu sempit. Hambatan selanjutnya adalah dari pemberian hasil parkir untuk meningkatkan pendapatan Asli Gampong yng sama sekali tidak diberikan oleh pihak parkir. Sehingga hal ini menjadi suatu hambatan dalam pencapaian inklusivitas yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Fazlan, R. (2022). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Penelitian Museum Pltd Apung Kota Banda Aceh). *Skripsi*. UPT. Perpustakaan UIN-Arraniry
- Handoyo, F., Sholihah, A. N., Novitariasari, A., Hani, A. F., Firdausa, Q. P., & Rahayuningsih, H. (2017). Paket wisata bagi difabel di yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(2), 116–128.

- Herizal. (2021). Kebijakan Kepariwisataan di Provinsi Aceh: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Publik Policy*. 7 (1).
- Husniati, A.M & Maryam. (2020). Konstruksi Identitas Komunikasi Pemasaran Pariwisata Halal Aceh. *JURNALISME: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 9 (1).
- Ismail, N., Salleh, N., Omain, S.-Z., Idris, N., Samori, Z., & Anas, N. (2023). Heritage Tourism at the Historical Town of Malacca: Examining Opportunities, Evaluating Challenges. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(1)
- Miller, F. A., & Katz, J. H. (2009). *The Inclusion Breakthrough: Unleashing The Real Power of Diversity*. California: Berrett-Koehler Publisher.
- Nawing, A.Y. (2019). Pengembangan Kawasan Percontohan Eknomi Inklusif Berbasis Sektor Pariwisata Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara. *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*. 2 (2)
- Ramadhani, R. (2024). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Ujung Batu Di Kabupaten Barru Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Analisis Pariwisata Syariah). *Skripsi*. IAIN Parepare
- Saputra, H.J. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutandan Inklusif Pada Kawasan Desa Wisata Pulau Derawan. *E-Jurnal Kewirausahaan*. 5 (1).
- Wahid, A. (2018). Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami. *Research Gate*, Vol.2 No.2, 1-20.
- Wahyuningsih, S. (2018). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Inklusivitas Pariwisata. *Jurnal Penelitian & PKM*, 4(2), 129–389. <http://repository.usu.ac.id>
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 202
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen
- Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009
- Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2020
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. (2024). Kontribusi Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pariwisata.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen. (2024). Data Jumlah Kunjungan Wisatawan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. (2024). Data Perekonomian Kabupaten Bireuen.